



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 10472-10481
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Dana Desa di Desa Tanjung Beringin Kabupaten Karo

Uria Utari Br Sinuraya¹, Erika Revida^{2✉}

Universitas Sumatera Utara

Email: erika.usu.id^{2✉}

Abstrak

Pemberdayaan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong kemandirian dalam mengelola sumber daya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pemberdayaan serta hambatan dalam implementasi program yang bersumber dari dana desa di Desa Tanjung Beringin. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat masih rendah dan bersifat formalitas, terutama terbatas pada tahap pelaksanaan. Kurangnya komunikasi serta pendampingan dari pemerintah desa turut menjadi hambatan. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan pemberdayaan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas masyarakat secara nyata.

Kata Kunci: *Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa*

Abstract

Empowerment plays a vital role in enhancing community welfare by promoting independence in managing resources. This study aims to identify the forms of empowerment and the obstacles in implementing village fund programs in Tanjung Beringin Village. A descriptive qualitative method was employed through interviews, observation, documentation, and literature study. The results indicate that community involvement remains low and is mostly limited to the implementation stage. Lack of communication and insufficient support from village authorities also hinder program effectiveness. These findings highlight the need for a more participatory and sustainable empowerment approach to strengthen community capacity meaningfully.

Keywords: *Community Empowerment, Village Fund, Village Government*

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil dalam struktur ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks otonomi daerah, desa menempati posisi strategis sebagai entitas yang memiliki hak politik dan administratif untuk mengatur serta mengelola urusan rumah tangganya sendiri (Revida, dkk, 2024). Desa merupakan pondasi penting dalam bangunan negara, di mana tanpa kehadiran dan pemberdayaan desa yang kuat, pembangunan nasional tidak akan berjalan secara menyeluruh dan berkelanjutan (Fadli, 2013). Dalam sistem pemerintahan yang desentralistik, desa memiliki kewenangan yang lebih luas pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, termasuk dalam hal perencanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya, hingga pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

Pemberian otonomi kepada desa menjadi bagian dari implementasi prinsip desentralisasi yang memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dan desa untuk merespons kebutuhan lokal secara cepat dan tepat (Revida, dkk, 2023). Salah satu bentuk dukungan nyata pemerintah pusat terhadap desa adalah melalui kebijakan Dana Desa (DD) yang mulai digulirkan sejak tahun 2015. Dana Desa merupakan bagian dari kebijakan fiskal nasional yang bertujuan untuk memperkuat desa sebagai subjek pembangunan (Revida, Murni & Purba, 2021). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023, Dana Desa dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan melalui pemerintah kabupaten/kota kepada desa-desa di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah agar desa mampu membiayai pembangunan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat berdasarkan kebutuhan serta potensi lokal. Prioritas penggunaan Dana Desa adalah 80% untuk pembangunan dan 20% untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Desa Tanjung Beringin, salah satu dari 22 desa di Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, menjadi objek penelitian ini karena memiliki alokasi Dana Desa yang cukup signifikan, yakni sebesar Rp 934.151.000 pada tahun 2024 (Kementerian Keuangan RI, 2024). Desa ini terdiri dari dua dusun dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 786 jiwa. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo (2020), mayoritas masyarakat desa bekerja di sektor pertanian, sehingga ketahanan dan kesejahteraan ekonomi desa sangat tergantung pada keberhasilan sektor ini. Berbagai program telah dilaksanakan melalui Dana Desa, seperti pendampingan petani, penyediaan benih dan obat tanaman, bantuan pangan bergizi untuk lansia, serta pembangunan infrastruktur. Namun demikian, pelaksanaan program-program ini masih menghadapi berbagai kendala dalam hal partisipasi masyarakat dan efektivitas pelaksanaan di lapangan.

Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan, ditemukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi program yang didanai oleh Dana Desa masih rendah. Musyawarah desa yang seharusnya menjadi ruang partisipatif dalam merancang agenda pembangunan cenderung hanya dihadiri oleh segelintir orang, sementara sebagian besar warga tidak terlibat secara aktif. Pemerintah desa pun belum menunjukkan strategi pemberdayaan yang terstruktur dan konsisten, terutama dalam aspek komunikasi publik, transparansi penggunaan anggaran, serta pelibatan warga dalam setiap tahapan program. Ketidakterlibatan masyarakat secara bermakna ini berdampak pada rendahnya rasa kepemilikan terhadap program, serta berpotensi menimbulkan ketimpangan antara tujuan program dan kebutuhan riil masyarakat.

Fenomena ini sejalan dengan berbagai hasil penelitian terdahulu yang menyoroti dinamika pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Penelitian oleh Lestari dan Kuswana (2020) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan Alokasi Dana Desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika pelaksanaannya melibatkan warga secara aktif dalam perencanaan hingga evaluasi. Penelitian lainnya dilakukan oleh Ulumiyah dkk. (2013) menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak swasta dalam upaya pemberdayaan, tetapi tidak menyoroti secara khusus mekanisme implementasi Dana Desa. Lebih lanjut penelitian Purwanti dan Suandi (2022) lebih menitikberatkan pada peran kebijakan Dana Desa sebagai regulasi, bukan pada bagaimana dana tersebut diimplementasikan untuk pemberdayaan secara langsung.

Penelitian ini berbeda dengan ketiga studi terdahulu tersebut karena berfokus pada implementasi konkret Dana Desa sebagai alat pemberdayaan di Desa Tanjung Beringin, serta mengevaluasi bagaimana program-program yang ada dijalankan dalam konteks

partisipasi dan dukungan pemerintah desa. Penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan dari Stewart (1998) yang mencakup enam pendekatan, yaitu *enabling*, *facilitating*, *consulting*, *collaborating*, *mentoring*, dan *supporting*. Dengan pendekatan ini, peneliti ingin mendeskripsikan bagaimana proses pemberdayaan masyarakat berlangsung, tantangan yang dihadapi, serta sejauh mana Dana Desa berkontribusi dalam peningkatan kapasitas dan kesejahteraan warga.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Dana Desa di Desa Tanjung Beringin berjalan sesuai prinsip-prinsip partisipasi dan keberlanjutan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa maupun pemangku kepentingan lainnya dalam merancang kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Dana Desa di Desa Tanjung Beringin. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Informan dipilih secara purposive, yaitu mereka yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam pelaksanaan program pemberdayaan desa. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan model Miles dan Huberman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Dana Desa di Desa Tanjung Beringin dianalisis menggunakan pendekatan teori Stewart (1998), yang mencakup enam indikator utama: *enabling*, *facilitating*, *consulting*, *collaborating*, *mentoring*, dan *supporting*. Setiap indikator mencerminkan dimensi penting dalam mendorong kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

1. *Enabling* (Membuat Masyarakat Mampu)

Pemberdayaan melalui pendekatan *enabling* bertujuan menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat memiliki kapasitas untuk menentukan dan mengelola kepentingannya sendiri. Di Desa Tanjung Beringin, indikator ini tampak pada pelaksanaan pelatihan pertanian yang ditujukan kepada kelompok petani sebagai respon atas

dominannya sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian masyarakat. Pemerintah desa juga menyalurkan bantuan benih dan pupuk guna mendukung praktik pertanian warga. Upaya ini sejalan dengan prinsip dasar pemberdayaan, yaitu mendorong masyarakat agar tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memiliki kemampuan mengelola potensi lokal secara mandiri (Revida, Munthe & Purba, 2022). Namun demikian, kegiatan *enabling* masih bersifat insidental dan belum terintegrasi dalam program pembinaan jangka panjang. Keterbatasan dalam hal frekuensi pelatihan, materi yang diajarkan, serta tidak adanya sistem evaluasi pascapelatihan menjadikan proses peningkatan kapasitas masyarakat belum optimal. *Enabling* seharusnya bukan hanya menciptakan kemampuan teknis sesaat, tetapi juga memperkuat daya pikir kritis dan kemampuan warga dalam menyusun strategi pembangunan secara kolektif (Revida & Munthe, 2020).

2. *Facilitating* (Mempermudah Akses dan Pelaksanaan)

Facilitating merujuk pada tindakan pemerintah desa dalam menyediakan kemudahan bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan (Revida, dkk, 2022). Hal ini mencakup penyediaan sarana prasarana dan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pemerintah Desa Tanjung Beringin telah menunjukkan upaya pada aspek ini melalui pembangunan jalan usaha tani, penyediaan les gratis bagi anak-anak, serta bantuan makanan bergizi untuk lansia. Akses masyarakat terhadap layanan dasar menjadi lebih baik melalui penggunaan Dana Desa untuk sektor sosial dan infrastruktur. Namun, meskipun program-program tersebut telah terlaksana, penyebaran informasi terkait program masih kurang maksimal. Masyarakat sering kali tidak mengetahui secara detail tahapan program, kriteria penerima manfaat, atau cara berpartisipasi. Forum komunikasi publik yang terbuka dan dialogis pun belum dibentuk, sehingga meskipun sarana telah disediakan, keterlibatan masyarakat belum terfasilitasi secara menyeluruh. *Facilitating* seharusnya melibatkan upaya mempermudah secara struktural maupun kultural, termasuk menumbuhkan kepercayaan dan rasa aman warga untuk terlibat aktif (Indra, Sibarani, Revida, 2024).

3. *Consulting* (Konsultasi dan Penjaringan Aspirasi)

Prinsip *consulting* dalam pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menjamin adanya komunikasi dua arah antara pemerintah desa dan warga, sehingga aspirasi masyarakat dapat diakomodasi dalam setiap tahap pembangunan (Revida, dkk, 2020). Dalam praktiknya di Desa Tanjung Beringin, musyawarah desa memang dilaksanakan, namun pelibatan masyarakat cenderung bersifat seremonial. Forum musyawarah belum

menjadi ruang yang terbuka dan dinamis untuk menjangkau suara masyarakat secara utuh. Sebagian besar keputusan program telah dirancang oleh aparatur desa sebelum musyawarah dilakukan, dan masyarakat hanya diminta untuk menyetujui atau menerima keputusan tersebut. Selain itu, tidak semua kalangan masyarakat hadir dalam forum musyawarah, terutama kelompok marginal seperti perempuan, lansia, atau petani kecil. Akibatnya, program yang disusun tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat. Kurangnya konsultasi berdampak pada rendahnya rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap program, yang pada akhirnya menghambat efektivitas pelaksanaan di lapangan. Prinsip consulting yang ideal seharusnya mampu membangun dialog sejajar antara pemangku kebijakan dan warga, bukan sekadar formalitas administratif.

4. *Collaborating* (Kolaborasi dalam Perencanaan dan Pelaksanaan)

Indikator *collaborating* menunjukkan adanya kerja sama aktif antara pemerintah desa dan masyarakat dalam keseluruhan siklus program pemberdayaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi (Revida, dkk, 2025). Namun, di Desa Tanjung Beringin, bentuk kolaborasi yang terjadi masih terbatas pada pelaksanaan fisik proyek, seperti pelibatan warga sebagai tenaga kerja dalam pembangunan infrastruktur. Kerja sama yang strategis, seperti penyusunan agenda prioritas, desain program, atau evaluasi dampak, belum dilaksanakan secara kolaboratif. Pemerintah desa masih memegang kontrol utama dalam pengambilan keputusan, dan masyarakat berada pada posisi sebagai pelaksana pasif. Ketiadaan forum monitoring bersama antara warga dan aparat desa menunjukkan bahwa ruang kolaborasi belum terbentuk secara struktural. Padahal, kolaborasi yang sejati dapat memperkuat sinergi sosial dan menumbuhkan inovasi lokal berbasis aspirasi masyarakat. Kolaborasi yang dibangun hanya di tingkat teknis tidak cukup untuk mewujudkan pemberdayaan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

5. *Mentoring* (Pembimbingan dan Pendampingan)

Mentoring merupakan proses penting dalam pemberdayaan yang bertujuan mendampingi masyarakat agar mampu mengembangkan kapasitasnya secara berkelanjutan (Simanjuntak, dkk, 2022). Pendampingan yang baik tidak hanya memberikan arahan teknis, tetapi juga mendukung proses pembelajaran masyarakat secara kolektif. Di Desa Tanjung Beringin, pelaksanaan aspek mentoring masih sangat terbatas. Setelah pelatihan atau pemberian bantuan dilakukan, tidak ada mekanisme pendampingan lanjutan yang memungkinkan warga untuk berkonsultasi atau memperdalam keterampilan yang diperoleh. Pemerintah desa belum menunjuk tenaga pendamping khusus, baik dari internal

desa maupun pihak eksternal seperti LSM atau penyuluh pertanian. Akibatnya, keberlanjutan program sering kali berhenti di tengah jalan karena tidak adanya dukungan teknis dan moral yang konsisten. Mentoring yang efektif seharusnya menjadi jembatan antara masyarakat dan program, sehingga mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga aktor utama dalam transformasi sosial di desa.

6. *Supporting* (Dukungan Moral dan Material)

Indikator *supporting* mencakup pemberian dukungan dalam bentuk material, emosional, maupun kelembagaan agar masyarakat dapat menjalankan peran pemberdayaan secara berdaya (Tanjung, dkk, 2022). Pemerintah Desa Tanjung Beringin memang telah memberikan bantuan fisik seperti benih, pupuk, dan makanan tambahan. Namun dari sisi dukungan nonmaterial, seperti motivasi, pengakuan, serta pembentukan kelembagaan masyarakat, belum banyak dilakukan. Tidak terdapat sistem penghargaan bagi warga yang aktif dalam kegiatan pembangunan desa, maupun forum aspirasi yang rutin digelar untuk membangun solidaritas dan semangat kolektif. Lemahnya dukungan non-material menyebabkan rendahnya partisipasi sukarela dan minimnya inovasi dari masyarakat sendiri. Pemberdayaan tidak hanya membutuhkan bantuan materi, tetapi juga ekosistem sosial yang mendukung tumbuhnya inisiatif dan tanggung jawab bersama. Tanpa adanya support yang kuat, program yang ada cenderung berumur pendek dan tidak berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Tanjung Beringin, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan Dana Desa belum sepenuhnya berjalan secara optimal dan partisipatif. Meskipun terdapat program-program yang menunjang peningkatan kapasitas masyarakat, seperti pelatihan pertanian dan bantuan sosial, pelibatan warga dalam proses perencanaan dan evaluasi masih minim. Pemerintah desa masih memegang peran dominan dalam pengambilan keputusan, sementara masyarakat cenderung berperan sebagai pelaksana. Untuk itu, perlu adanya pendekatan yang lebih terbuka dan berkelanjutan dalam proses pemberdayaan, agar Dana Desa benar-benar dapat digunakan sebagai alat transformasi sosial yang mampu mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R. (2022). Pemanfaatan dana desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat (Studi pada Desa Tewah Pupuh Kecamatan Benua Lima). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 12(1), 45–53.
- Alfandi, S., & Asmu'i. (2023). Implementasi kebijakan penggunaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Sengayam. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(1), 35–42.
- Bahri, E. S. (2013). *Pemberdayaan masyarakat: Konsep dan aplikasi*. Kediri: FAM Publishing.
- Bahri, E. S. (2019). *Pemberdayaan masyarakat berkelanjutan*. Kediri: FAM Publishing.
- Bogar, M. S., de Rozari, P. E., & Tingga, C. A. (2022). Pengaruh dana desa melalui pemberdayaan masyarakat untuk menurunkan angka kemiskinan di Desa Hewokloang, Kabupaten Sikka. *Wawasan: Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi & Kewirausahaan*, 2(3), 210–220.
- Damanik, S. E. (2019). *Pemberdayaan masyarakat desa sekitar kawasan hutan*. Surabaya: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Handono, S. Y., Hidayat, K., & Purnomo, M. (2020). *Pemberdayaan masyarakat pertanian*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2006). *Community development: Community-based alternatives in an age of globalisation*. Pearson Education Australia.
- Indra, R., Sibarani, R., & Revida, E. (2024). Ethnographic research: Potential of local culinary as a tourist attraction object in Simalungun Regency, Indonesia. *International Journal of Economics and Management*, 2(01), 19–33.
- Ismail, I., Hidayat, Y., & Yunani, A. (2022). Effectiveness of village fund management in community empowerment. *Journal of Development Studies*, 1(1), 27–38.
- Mulyana, M., & Habib, M. A. (2024). Efektivitas dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Tambusai Batang Dui, Kab. Bengkalis. *JEKP (Jurnal Ekonomi & Keuangan Publik)*, 11(1), 15–26.
- Mustanir, A., Faried, A. I., Mursalat, A., Kusnadi, I. H., Fauzan, R., Siswanto, D., & Widiyawati, R. (2023). *Pemberdayaan masyarakat*. Jakarta: Global Eksekutif Teknologi.
- Najoan, G., Laloan, C., & Kandori, I. (2023). Efektivitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Tountimomor. *Literacy: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 4(2), 315–321.
- Nasendi, Y. M., Toroby, R. J., & Raharjo, D. (2022). Pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. *Kaganga: Jurnal*

- Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora, 7(2), 101–110.
- Nurmalasari, D. N., & Supriyadi, E. I. (2021). Efektivitas pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat (Studi pada Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung). *Jurnal Identitas*, 1(1), 64–74.
- Pratama, W. B., Syarfi, I. W., & Hasnah, H. (2021). Efektivitas pemberdayaan masyarakat menggunakan dana desa di Kabupaten Pasaman Barat. *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, 18(2), 110–122.
- Putri, B. N., Dewi, M. W., & Pratiwi, D. N. (2024). Optimalisasi alokasi dana desa: Pengaruh akuntabilitas dan kinerja pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 3(3), 597–604.
- Raharjo, M. M. I. (2021). *Pengelolaan dana desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Revida, E., & Munthe, H. M. (2020). Implementation model of tourism village policy to enhance community participation at meat tourism village Toba Samosir North Sumatra.
- Revida, E., Hidayatulloh, A. N., Soetijono, I. K., Hermawansyah, A., Purba, B., Tawakkal, M. I., ... & Asmarianti, A. (2020). *Teori administrasi publik*. Yayasan kita menulis.
- Revida, E., Trimurni, F., & Purba, S. (2021). The innovation of tourist villages to enhance tourist visits in Samosir, North Sumatera. *Rigeo*, 11 (5).
- Revida, E., Munthe, H. M., & Purba, S. (2022). Increasing tourist visits through the development model of tourism village based on local culture. *Journal of Environmental Management & Tourism*, 13(4), 1151-1160.
- Revida, E., Purba, S., Faza, I., Yendrianof, D., Syafrizal, S., Pratiwi, I. I., ... & Hendrayani, Y. (2022). Tata kelola BUMDes dalam pengembangan desa wisata. *Yayasan Kita Menulis*.
- Revida, E., Ismail, R., Lumbanraja, P., Trimurni, F., Sembiring, S. A. B., & Purba, S. (2023). Village owned enterprises governance (BUMDes) based on the tourism village development. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 18(10), 3341-3346.
- Revida, E., Kusmanto, H., Nasution, M. A., & Purba, S. (2024). Enhancing Tourist Village Quality Through Community Behavior Models. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 19(6).
- Revida, E., Purba, S., Abdullah, S., Dewi, I. K., Kurniullah, A. Z., Mariana, M., ... & Novindra, N. (2025). *Collaborative Governance*. Yayasan Kita Menulis.
- Sihombing, E. N. (2021). *Hukum pemerintahan desa*. Medan: Kumpulan Buku Dosen.

- Simanjuntak, M., Revida, E., Ainun, W. O. N., Handiman, U. T., Efendi, E., Simarmata, H. M. P., ... & Estiani, E. (2022). Pengantar Teori dan Perilaku Organisasi. Yayasan Kita Menulis.
- Stewart, A. M. (1998). Empowering people. Yogyakarta: Kanisius.
- Tanjung, R., Yendrianof, D., Purba, S., Revida, E., Damayanti, W. K., Silalahi, M., ... & Sinambela, M. (2022). Manajemen Pelayanan Publik Era 4.0. Yayasan Kita Menulis.
- Wiraswata, T. M., Iba, Z., & Khairul, A. (2023). Pengaruh anggaran dana desa dan perilaku inovatif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat – Studi Gampong Blang Panjoe, Bireuen. *IndOmera*, 6(11), 22–31.